

Filsafat Dialog dan Tantangan Toleransi Beragama dalam Masyarakat Multikultural

Yanarius Andar¹, Wahyu Y De Galeliano Feni², Santos Kanisius Firmus Petu³, Servasius Igusta Bria⁴

¹Program Studi Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, yanariusandar@gmail.com

²Program Studi Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, wahyufeni92@gmail.com

³Program Studi Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, santoskanisius52@gmail.com

⁴Program Studi Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, bgusti009@gmail.com

Info Artikel

Article history:

Received Feb 25, 2026

Revised Mar 13, 2026

Accepted Mar 30, 2026

Published Mar 30, 2026

Kata Kunci:

Alteritas, Dialog antaragama, Filsafat Dialog, Masyarakat multikultural, Toleransi beragama.

Keywords:

Alterity, Interreligious dialogue, Multicultural society, Philosophy of dialogue, Religious tolerance.

ABSTRAK

Dalam dunia yang semakin plural dan saling terhubung, masyarakat multikultural menjadi realitas sosial yang tidak terhindarkan. Perbedaan agama, budaya, dan pandangan hidup menuntut adanya upaya serius untuk membangun toleransi dan harmoni. Tulisan ini bertolak dari perspektif filsafat dialog, terutama pemikiran Hans-Georg Gadamer, Martin Buber, dan Raimon Panikkar, sebagai dasar refleksi kritis atas relasi antarumat beragama dalam konteks masyarakat multikultural. Filsafat dialog menekankan pentingnya keterbukaan, pengakuan atas alteritas (keterbedaan), dan sikap saling mendengarkan sebagai jalan menuju pemahaman yang lebih dalam. Namun demikian, penerapan filsafat dialog menghadapi berbagai tantangan, seperti eksklusivisme teologis, fanatisme agama, politik identitas, dan ketimpangan sosial-budaya. Kajian ini menunjukkan bahwa toleransi bukan sekadar sikap pasif menerima perbedaan, melainkan sebuah proses dialogis yang aktif dan reflektif. Oleh karena itu, filsafat dialog menawarkan kerangka etis dan epistemologis yang relevan untuk memperkuat toleransi beragama di tengah kompleksitas masyarakat multikultural.

ABSTRACT

In an increasingly plural and interconnected world, multicultural societies are an unavoidable social reality. Differences in religion, culture, and worldview demand serious efforts to build tolerance and harmony. This paper departs from the perspective of the philosophy of dialogue, especially the thoughts of Hans-Georg Gadamer, Martin Buber, and Raimon Panikkar, as a basis for critical reflection on interfaith relations in the context of multicultural society. The philosophy of dialogue emphasizes the importance of openness, recognition of alterity, and mutual listening as a path to deeper understanding. However, the application of the philosophy of dialogue faces various challenges, such as theological exclusivism, religious fanaticism, identity politics, and socio-cultural inequality. This study shows that tolerance is not just a passive acceptance of differences, but an active and reflective dialogical process. Therefore, the philosophy of dialogue offers an ethical and epistemological framework that is relevant to strengthening religious tolerance amid the complexities of a multicultural society.

Corresponding Author:

Name: Yanarius Andar

Institution: Program Studi Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia

Email: yunariusandar@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Masyarakat modern dihadapkan pada realitas multikultural yang semakin kompleks sebagai akibat dari globalisasi, urbanisasi, dan mobilitas manusia lintas batas. Keragaman agama, budaya, dan identitas menjadi ciri khas yang tak terelakkan dari kehidupan sosial dewasa ini. Namun, di tengah pluralitas tersebut, muncul berbagai ketegangan dan konflik yang berakar pada kesalahpahaman antarumat beragama. Dalam konteks ini, toleransi beragama bukan hanya menjadi wacana moral, tetapi juga kebutuhan sosial-politik yang mendesak.

Filsafat dialog menawarkan pendekatan reflektif dan transformatif dalam membangun relasi yang sehat antar pemeluk agama yang berbeda. Sebagai suatu cabang dari filsafat intersubjektif, filsafat dialog menekankan pentingnya perjumpaan yang otentik antara subjek-subjek yang setara. Martin Buber, misalnya, melalui karyanya *I and Thou*, mengajukan konsep relasi “Aku-Engkau” yang mendalam dan personal, sebagai dasar bagi pemahaman dan penerimaan terhadap yang lain. Dalam relasi semacam ini, keberadaan orang lain tidak dikurangi menjadi objek, melainkan diakui sebagai pribadi dengan martabat penuh.

Demikian pula, Hans-Georg Gadamer dalam teori hermeneutikanya menyatakan bahwa dialog adalah proses memahami melalui horizon-horizon yang saling berjumpa, di mana keterbukaan menjadi syarat utama terbentuknya pengertian. Pemikiran ini diperluas oleh Raimon Panikkar, seorang teolog dan filsuf dialog antaragama, yang menekankan bahwa dialog tidak bertujuan untuk menghilangkan perbedaan, melainkan untuk menghayati perbedaan itu sendiri secara mendalam. Oleh karena itu, filsafat dialog tidak hanya bernilai epistemologis, melainkan juga etis dan spiritual.

Kendati demikian, penerapan filsafat dialog dalam masyarakat multikultural menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah eksklusivisme keagamaan, fanatisme ideologis, ketimpangan sosial, serta hegemoni kebenaran tunggal yang kerap menjadi penghalang terbentuknya ruang dialog yang adil dan setara. Toleransi beragama yang diharapkan pun sering kali terjebak dalam sikap permisif atau pasif, tanpa menyentuh akar persoalan relasional dan struktural yang lebih dalam.

Tulisan ini bertujuan untuk menggali kontribusi filsafat dialog dalam merespons tantangan toleransi beragama di tengah masyarakat multikultural. Dengan pendekatan reflektif-kritis dan studi literatur filosofis, tulisan ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam merumuskan model toleransi yang lebih manusiawi, inklusif, dan transformatif.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan metode pustaka. Oleh karena itu dari metode yang penulis juga mengolaborasi dari beberapa sumber lainnya yakni buku-buku, artikel dan lainnya sebagai referensi yang mendukung penjelasan dari tulisan ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Filsafat Dialog: Konsep Dan Tokoh Utama

Filsafat dialog merupakan cabang pemikiran filosofis yang berangkat dari relasi antarpribadi sebagai dasar eksistensial manusia. Dalam filsafat ini, kebenaran tidak dipahami sebagai sesuatu yang statis dan individualistik, melainkan sebagai hasil dari proses dialogis antara subjek-subjek yang saling terbuka. Dialog bukan sekadar pertukaran informasi, melainkan ruang perjumpaan antara eksistensi yang mengandaikan keterbukaan, penghargaan terhadap perbedaan, dan komitmen pada pencarian makna bersama.

1. Martin Buber dan Relasi “Aku-Engkau”

Martin Buber adalah salah satu tokoh sentral dalam filsafat dialog. Dalam karyanya *I and Thou* (Ich und Du), Buber membedakan dua jenis relasi fundamental manusia: relasi "Aku-Itu" (I-It) dan relasi "Aku-Engkau" (I-Thou). Relasi I-It bersifat objektif, instrumental, dan berjarak, sementara relasi I-Thou bersifat personal, dialogis, dan mengakui kehadiran orang lain sebagai subjek yang utuh. Dalam konteks keberagaman agama, pendekatan Buber mengajak setiap individu untuk tidak melihat pemeluk agama lain sebagai "yang asing" atau objek konversi, melainkan sebagai sesama subjek yang layak untuk dihormati dalam relasi yang setara.

2. Hans-Georg Gadamer dan Hermeneutika Dialogis

Hans-Georg Gadamer mengembangkan teori hermeneutika filosofis yang berfokus pada proses pemahaman melalui dialog antara “horizon makna” yang berbeda. Baginya, pemahaman bukanlah hasil dari penguasaan sepihak atas makna, tetapi merupakan fusi horison (fusion of horizons) antara penafsir dan teks atau antara dua kesadaran historis yang berbeda. Dalam kerangka ini, toleransi beragama hanya dapat dibangun apabila setiap pihak bersedia memasuki horizon yang lain tanpa kehilangan identitasnya sendiri. Ini menuntut sikap dialogis yang menanggukuhkan prasangka, membuka diri terhadap yang lain, dan menempatkan keheningan serta mendengarkan sebagai bagian dari proses penafsiran.

3. Raimon Panikkar dan Dialog Antaragama

Raimon Panikkar memperluas filsafat dialog dalam konteks pluralisme agama. Ia memperkenalkan istilah *intra-religious dialogue*, yaitu dialog yang terjadi bukan hanya antaragama, tetapi juga dalam batin individu yang menghayati pluralitas iman di dalam dirinya sendiri. Bagi Panikkar, dialog bukan untuk mencapai konsensus atau menyatukan dogma, melainkan untuk saling memperkaya dalam keberbedaan. Ia menolak relativisme maupun eksklusivisme, dan memilih jalan “kenosis” atau pengosongan diri sebagai syarat utama dalam dialog yang sejati. Konsep ini sangat relevan dalam masyarakat multikultural di mana perbedaan tidak bisa dieliminasi, tetapi justru perlu dihargai sebagai anugerah.

Tantangan Toleransi Beragama Dalam Masyarakat Multikultural

Masyarakat multikultural ditandai oleh keanekaragaman identitas budaya, etnis, bahasa, dan agama. Dalam konteks ini, toleransi beragama menjadi syarat fundamental bagi perdamaian dan kohesi sosial. Namun, di tengah semangat inklusivitas, terdapat sejumlah tantangan serius yang menguji sejauh mana masyarakat mampu mewujudkan kehidupan bersama yang harmonis. Serta mampu hidup dalam suatu komunitas yang majemuk dan mampu memahami, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi beragama dalam masyarakat yang plural.

Eksklusivisme Religius dan Klaim Kebenaran Absolut

Salah satu tantangan utama dalam toleransi beragama adalah eksklusivisme, yaitu keyakinan bahwa hanya satu agama yang benar secara mutlak, sementara agama lain dianggap sesat atau keliru. Sikap ini kerap menjadi penghalang utama dialog antarumat beragama, karena menutup ruang bagi saling memahami dan menghargai perbedaan.

Menurut John Hick, teolog pluralis, eksklusivisme menjadi penyebab utama ketegangan antarumat beragama karena "membatalkan legitimasi iman yang lain dalam ruang publik". Padahal, dalam masyarakat multikultural, pengakuan akan keberadaan dan martabat agama lain menjadi dasar dari koeksistensi damai dan saling menghormati tanpa adanya sikap diskriminatif.

Politik Identitas dan Instrumentalisasi Agama

Politik identitas (identity politics) adalah strategi politik yang berfokus pada pengelompokan individu berdasarkan ciri-ciri identitas tertentu, seperti agama, etnisitas, ras, atau gender. Dalam praktiknya, politik identitas berupaya memobilisasi massa melalui kesamaan identitas untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan dominasi suatu kelompok.

Dalam konteks masyarakat multikultural, politik identitas menjadi tantangan ketika identitas agama dimanfaatkan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan politik, alih-alih sebagai sarana membangun kesadaran kebersamaan. Hal ini seringkali melahirkan polarisasi, stereotip, dan konflik antarumat beragama.

Instrumentalisasi agama mengacu pada praktik menggunakan simbol, doktrin, dan emosi keagamaan demi kepentingan politik kekuasaan. Dalam konteks ini, agama direduksi menjadi alat ideologis untuk memperoleh legitimasi sosial dan memenangkan suara politik. Praktik ini tidak hanya mereduksi nilai-nilai agama, tetapi juga memicu pertentangan horizontal antarwarga.

Sebagaimana dicatat oleh Olivier Roy, "agama yang dipolitisasi cenderung kehilangan substansi spiritualnya dan berubah menjadi ideologi kekuasaan". Hal ini terlihat jelas dalam berbagai konteks politik global dan lokal, di mana agama dijadikan senjata dalam kontestasi politik.

Agama sering dijadikan alat dalam politik identitas, di mana afiliasi keagamaan dipolitisasi demi kepentingan kelompok tertentu. Instrumentalisasi ini memicu segregasi sosial dan memperbesar polarisasi antarumat beragama. Di Indonesia, kasus Pilkada DKI Jakarta 2017 menunjukkan bagaimana sentimen keagamaan dapat dimobilisasi untuk tujuan elektoral, yang berujung pada ketegangan antarwarga.

Menurut Azyumardi Azra, penyalahgunaan agama dalam ruang politik justru merusak nilai-nilai sakral dan transenden agama itu sendiri serta memperburuk toleransi antarumat.

Minimnya Pendidikan Toleransi dan Literasi Antaragama

Salah satu akar dari intoleransi di masyarakat multikultural adalah absennya pendidikan toleransi yang sistematis dan berkelanjutan, khususnya dalam sistem pendidikan formal. Di banyak negara, termasuk Indonesia, kurikulum pendidikan agama seringkali diajarkan secara eksklusif tanpa membuka ruang dialog antariman. Hal ini memperkuat mentalitas "kami" versus "mereka", dan menumbuhkan sikap eksklusif terhadap keyakinan

berbeda. Banyak lembaga pendidikan, khususnya di tingkat menengah dan tinggi, belum menjadikan dialog antaragama sebagai bagian dari pembelajaran aktif. Akibatnya, mahasiswa atau siswa cenderung hanya mengenal agamanya sendiri tanpa pernah berinteraksi dengan cara pandang religius lain. Hal ini menciptakan semacam isolasi kognitif dan membatasi kemampuan berpikir reflektif tentang keanekaragaman iman dan agama.

Kurangnya pemahaman lintas agama menjadi akar ketidaktoleranan di masyarakat. Banyak masyarakat tidak memahami ajaran agama lain karena tidak pernah mendapat pendidikan lintas iman yang memadai. Hal ini diperparah oleh bias kurikulum yang masih menekankan dogmatisme dan doktrin sempit.

Laporan UNESCO Global Citizenship Education menyebutkan bahwa pendidikan yang inklusif dan multikultural dapat menurunkan sikap ekstremisme dan intoleransi secara signifikan, terutama di kalangan generasi muda.

Penyebaran Intoleransi Melalui Media Sosial

Media sosial kini berfungsi sebagai agora digital atau ruang publik virtual tempat individu mengekspresikan pendapat, berbagi informasi, dan berinteraksi lintas batas geografis maupun budaya. Namun, di sisi lain, media sosial juga menjadi medium strategis bagi penyebaran ujaran kebencian (hate speech) dan intoleransi berbasis agama. Polarisasi identitas semakin menguat karena algoritma media sosial cenderung menciptakan echo chamber, yakni ruang informasi tertutup yang memperkuat prasangka dan membatasi perspektif pluralistik.

Di era digital, media sosial menjadi ranah baru bagi penyebaran ujaran kebencian berbasis agama. Algoritma platform digital sering memperkuat polarisasi, mempercepat penyebaran hoaks, dan membentuk echo chamber yang memperkuat prasangka antaragama.

Salah satu kekuatan media sosial adalah kemampuannya menghadirkan anonimitas. Hal ini memberi ruang bagi individu atau kelompok tertentu untuk menyebarkan ideologi intoleran atau bahkan radikal secara bebas tanpa takut identitasnya terungkap. Riset oleh Berger dan Morgan menunjukkan bahwa platform seperti YouTube, Twitter, dan Facebook telah digunakan secara sistematis oleh kelompok ekstremis untuk menyebarkan paham eksklusivisme keagamaan.

Fenomena ini semakin diperkuat dengan kemampuan viral media sosial yang memungkinkan narasi-narasi intoleran menyebar dengan sangat cepat, bahkan sebelum sempat diverifikasi kebenarannya. Penelitian oleh Müller dan Schwarz (2020) menemukan bahwa kenaikan ujaran kebencian berbasis agama di media sosial memiliki korelasi langsung dengan peningkatan insiden kekerasan terhadap kelompok minoritas.

Media sosial seringkali dimanfaatkan untuk menyebarkan hoaks atau disinformasi terkait keyakinan atau praktik agama lain. Informasi ini sengaja dikonstruksi untuk menciptakan ketakutan dan permusuhan terhadap kelompok agama yang berbeda. Dalam konteks Indonesia, laporan dari SAFEnet dan Amnesty International menunjukkan peningkatan signifikan konten keagamaan bermuatan intoleransi yang menysasar minoritas selama tahun-tahun politik identitas. Narasi yang paling sering ditemukan antara lain seperti: “agama X mengancam agama mayoritas”, “ritual Y adalah bentuk penyimpangan”, atau “pemimpin agama Z adalah antek asing”. Narasi semacam ini dirancang untuk menciptakan

keresahan dan memobilisasi massa atas dasar sentimen primordial keagamaan.

Ketimpangan Sosial-Ekonomi dan Sentimen Mayoritas-Minoritas

Dalam masyarakat multikultural, relasi antar kelompok keagamaan tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan iman, tetapi juga oleh ketimpangan struktural sosial dan ekonomi. Ketika satu kelompok agama mayoritas memiliki dominasi dalam akses terhadap pendidikan, ekonomi, dan kekuasaan politik, sementara kelompok minoritas cenderung termarginalkan, muncul relasi sosial yang timpang dan rentan terhadap konflik. Ketimpangan ini memperkuat persepsi eksklusivitas dan memperuncing jurang identitas.

Seperti dijelaskan oleh Pierre Bourdieu, struktur sosial yang timpang melahirkan habitus yang cenderung mempertahankan dominasi simbolik kelompok tertentu. Dalam konteks keagamaan, dominasi simbolik ini tampak dalam wacana publik, kurikulum pendidikan, dan kebijakan negara yang sering kali mengabaikan sensitivitas pluralisme.

Ketimpangan ekonomi kerap menjadi lahan subur bagi munculnya stereotip dan sentimen permusuhan terhadap kelompok agama tertentu. Di berbagai konteks, kelompok minoritas yang berhasil secara ekonomi seringkali dipandang sebagai “ancaman tersembunyi” oleh kelompok mayoritas, apalagi jika keberhasilan itu tidak diikuti oleh distribusi ekonomi yang merata. Hal ini menciptakan kecemburuan sosial dan mudah dimobilisasi untuk tujuan politik.

Sebagai contoh, dalam konteks Indonesia, stereotip terhadap kelompok Tionghoa Kristen sebagai pengendali ekonomi menjadi narasi laten yang kerap dimunculkan dalam konflik horizontal. Penelitian dari Bonar Tigor Naipospos menunjukkan bahwa konflik bernuansa keagamaan seringkali menyimpan akar ketimpangan ekonomi dan politik yang dalam.

Toleransi sering terkikis saat terjadi ketimpangan struktural antara mayoritas dan minoritas, baik dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, maupun representasi politik. Ketimpangan ini bisa memicu kecemburuan sosial yang menjelma dalam bentuk prasangka, diskriminasi, bahkan kekerasan terhadap kelompok agama tertentu. Konflik di Poso, Ambon, atau Rohingya di Myanmar menjadi contoh tragis bagaimana kombinasi antara ketimpangan sosial dan sentimen mayoritas-minoritas dapat memicu tragedi kemanusiaan.

IMPLIKASI FILSAFAT DIALOG BAGI TOLERANSI BERAGAMA

Filsafat dialog tidak hanya menawarkan pendekatan etis dalam relasi antarindividu, tetapi juga menyediakan kerangka filosofis untuk membangun masyarakat yang inklusif dan toleran dalam keberagaman agama. Dalam konteks masyarakat multikultural, filsafat dialog menekankan pentingnya keterbukaan, pengakuan terhadap “yang lain” sebagai subjek, serta relasi yang setara dan saling menghargai antarumat beragama.

Pengakuan atas “Yang Lain” sebagai Subjek

Pemikiran Martin Buber dalam *Ich und Du* (1923) memberikan dasar teologis dan eksistensial bagi toleransi. Bagi Buber, hubungan dialogis sejati muncul ketika individu memandang yang lain bukan sebagai objek (It), melainkan sebagai subjek (Thou) yang utuh dan setara. Dalam konteks keberagaman agama, pendekatan ini berarti bahwa umat beragama harus saling memandang sebagai pribadi yang bermartabat, bukan sekadar representasi doktrin atau identitas kolektif.

Pendekatan ini membangun landasan moral untuk menolak fanatisme dan eksklusivisme agama, karena dialog mengandaikan keterbukaan untuk memahami iman orang lain tanpa kehilangan identitas diri.

Tanggung Jawab Etis terhadap Liyan

Filsuf Emmanuel Levinas menekankan bahwa perjumpaan dengan wajah liyan memunculkan tanggung jawab etis yang mendahului relasi kognitif atau rasional. Dalam konteks pluralisme agama, kehadiran umat lain bukan sekadar perbedaan yang perlu dijelaskan, tetapi sebuah panggilan etis untuk menerima, melindungi, dan hidup berdampingan.

Konsep Levinas ini memperluas makna toleransi: bukan hanya membiarkan keberadaan agama lain, melainkan juga aktif menciptakan ruang bagi yang lain untuk eksis secara bebas dan bermartabat. Ini menuntut transformasi dari sikap permisif menjadi partisipatif.

Membangun Ruang Publik yang Dialogis

Filsafat dialog juga menuntut pengembangan ruang publik yang terbuka bagi diskursus lintas agama. Jürgen Habermas, dalam teorinya tentang tindakan komunikatif, menekankan pentingnya deliberative dialogue sebagai cara membangun konsensus dalam masyarakat plural. Dalam ranah agama, dialog bukan sekadar komunikasi antar elite agama, tetapi forum setara untuk berbagi pengalaman iman, nilai, dan aspirasi hidup bersama. Ruang publik semacam ini mendorong toleransi tidak sebagai kebijakan top-down, tetapi sebagai hasil proses partisipatif antarwarga negara yang berbeda keyakinan.

Melampaui Relativisme dan Fanatisme

Implikasi penting lainnya adalah filsafat dialog menghindari dua ekstrem yang merusak toleransi: relativisme total dan fanatisme. Dialog sejati tidak berarti menghapus perbedaan atau menyamakan semua kebenaran, tetapi membuka diri untuk memahami perspektif yang berbeda tanpa kehilangan komitmen terhadap kebenaran masing-masing.

Sebagaimana ditulis Paul Knitter, seorang teolog pluralis, “Dialog memungkinkan kita bertumbuh dalam iman melalui perjumpaan dengan iman yang lain”. Dalam hal ini, toleransi tidak menjadi bentuk kompromi nilai, melainkan cara memperkaya spiritualitas dan kemanusiaan bersama.

Pendidikan Dialogis dan Literasi Keberagaman

Dalam praktik sosial, implikasi filsafat dialog menuntut sistem pendidikan yang membangun kompetensi dialogis sejak dini. Kurikulum multikultural dan pendidikan agama yang bersifat inklusif perlu dikembangkan agar peserta didik mampu memahami keberagaman agama secara kritis dan konstruktif. Hal ini sejalan dengan gagasan Paulo Freire tentang pedagogi dialogis, yaitu pendidikan yang membebaskan dan membentuk kesadaran kolektif.

Filsafat dialog memberikan pendekatan yang sangat relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan toleransi beragama di masyarakat multikultural. Melalui konsep hubungan yang autentik, pemahaman yang terbuka, dan penghormatan terhadap martabat sesama, dialog dapat menjadi jembatan untuk menciptakan kerukunan dan harmoni sosial. Implementasi filsafat dialog tidak hanya menjadi tugas para intelektual, tetapi juga kewajiban setiap warga masyarakat untuk mewujudkan hidup berdampingan secara damai.

4. KESIMPULAN

Tulisan ini berupaya menunjukkan bahwa filsafat dialog dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun dan memperkuat toleransi antarumat beragama di tengah masyarakat yang plural dan multikultural. Dengan merujuk pada gagasan-gagasan para pemikir seperti Martin Buber, Hans-Georg Gadamer, Raimon Panikkar, Emmanuel Levinas, dan Jürgen Habermas, ditemukan bahwa dialog tidak semata dipahami sebagai pertukaran informasi, tetapi sebagai perjumpaan eksistensial yang sarat nilai etis, spiritual, dan hermeneutis.

Pertama, pemikiran Martin Buber tentang relasi Aku-Engkau menawarkan pemahaman bahwa dalam dialog, setiap pribadi dihadirkan sebagai subjek yang utuh dan bermartabat. Relasi ini menjadi fondasi etis bagi toleransi, karena menolak segala bentuk objektifikasi terhadap liyan. Kedua, pendekatan hermeneutik Hans-Georg Gadamer dengan konsep “fusi horizon” (fusion of horizons) menegaskan pentingnya keterbukaan dan keinginan saling memahami dalam konteks keberagaman, tanpa kehilangan identitas masing-masing.

Ketiga, Raimon Panikkar memperluas dimensi dialog menjadi ruang spiritual yang memungkinkan terjadinya perjumpaan antariman secara transformatif. Dialog dalam konteks ini tidak menuntut pembatalan iman, melainkan mengandung kenosis atau pengosongan diri agar mampu mendengarkan dan menyapa liyan secara autentik. Keempat, pendekatan Emmanuel Levinas memperdalam pemahaman dialog dari sudut pandang etika dengan menekankan tanggung jawab tak bersyarat terhadap kehadiran “wajah” orang lain, yang secara moral menuntut sikap respek dan keterbukaan.

Kelima, Jürgen Habermas melengkapi aspek teoritis dialog dengan kerangka komunikasi rasional dalam ruang publik. Ia menekankan pentingnya prinsip diskursus yang inklusif, di mana setiap suara termasuk yang religius yang dapat berpartisipasi secara setara dalam membentuk konsensus sosial.

Dengan demikian, filsafat dialog tidak hanya memiliki relevansi normatif dalam mempromosikan toleransi beragama, tetapi juga menyediakan kerangka etis, hermeneutik, dan praktis yang dapat diimplementasikan dalam berbagai ranah kehidupan: pendidikan, kebijakan publik, media sosial, dan relasi antar komunitas iman. Toleransi dalam bingkai filsafat dialog bukanlah sikap permisif yang membiarkan segala perbedaan tanpa refleksi, melainkan komitmen aktif untuk membangun pengertian bersama yang didasarkan pada saling mendengar, saling belajar, dan saling menghormati. Filsafat dialog merupakan tawaran yang relevan dan mendesak di tengah meningkatnya fragmentasi sosial dan politisasi agama. Ia mengajak setiap individu dan kelompok untuk memandang perbedaan bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk memperluas cakrawala kemanusiaan dan memperdalam dimensi spiritual keberagamaan.

Filsafat dialog memberikan pendekatan yang sangat relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan toleransi beragama di masyarakat multikultural. Melalui konsep hubungan yang autentik, pemahaman yang terbuka, dan penghormatan terhadap martabat sesama, dialog dapat menjadi jembatan untuk menciptakan kerukunan dan harmoni sosial. Implementasi filsafat dialog tidak hanya menjadi tugas para intelektual, tetapi juga kewajiban setiap warga masyarakat untuk mewujudkan hidup berdampingan secara damai.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Cambridge: Harvard University Press, 2008.
- Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos, 1999.
- Azra, Azyumardi. "Islam dan Politik Identitas." *Kompas*, 23 Maret 2018.
- Berger, J. M., dan Jonathon Morgan. *The ISIS Twitter Census: Defining and Describing the Population of ISIS Supporters on Twitter*. Brookings Project on U.S. Relations with the Islamic World, No. 20, 2015.
- Bernstein, Richard J. *Beyond Objectivism and Relativism: Science, Hermeneutics, and Praxis*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1983.
- Bourdieu, Pierre. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Cambridge: Harvard University Press, 1984.
- Buber, Martin. *I and Thou*. Diterjemahkan oleh Ronald Gregor Smith. New York: Charles Scribner's Sons, 1958.
- Casanova, Jose. *Public Religions in the Modern World*. Chicago: University of Chicago Press, 1994.
- Cornille, Catherine. *The Im-Possibility of Interreligious Dialogue*. New York: Crossroad Publishing Company, 2008.
- Freire, Paulo. *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum, 2000.
- Gadamer, Hans-Georg. *Truth and Method*. Diterjemahkan oleh Joel Weinsheimer dan Donald G. Marshall. London: Continuum, 2004.
- Habermas, Jürgen. *The Theory of Communicative Action, Vol. 1*. Boston: Beacon Press, 1984.
- Hick, John. *God Has Many Names*. Philadelphia: Westminster Press, 1982.
- International Crisis Group. *The Dark Side of Transition: Violence Against Muslims in Myanmar*, 2013.
- Juergensmeyer, Mark. *The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular State*. Berkeley: University of California Press, 1993.
- Knitter, Paul F. *Introducing Theologies of Religions*. Maryknoll: Orbis Books, 2002.
- Levinas, Emmanuel. *Totality and Infinity: An Essay on Exteriority*. Diterjemahkan oleh Alphonso Lingis. Pittsburgh: Duquesne University Press, 1969.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Muhtadi, Burhanuddin. "Politik Identitas dan Pilkada Jakarta 2017." *Jurnal Populi Center*, 2018.
- Müller, Karsten, dan Carlo Schwarz. "Fanning the Flames of Hate: Social Media and Hate Crime." *Journal of the European Economic Association* 18, no. 4 (2020): 2109–2151.
- Naipospos, Bonar Tigor. *Politisasi Agama dan Konflik Minoritas*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2010.
- Panikkar, Raimon. *The Intra-Religious Dialogue*. New York: Paulist Press, 1999.
- Pariser, Eli. *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. New York: Penguin Press, 2011.
- Roy, Olivier. *Holy Ignorance: When Religion and Culture Part Ways*. New York: Columbia University Press, 2010.
- Swidler, Leonard. "The Dialogue Decalogue: Ground Rules for Interreligious Dialogue." *Journal of Ecumenical Studies* 20, no. 1 (1983): 1–4.

- UNESCO. *Global Citizenship Education: Preparing Learners for the Challenges of the 21st Century*. Paris: UNESCO, 2014.
- Wahyudi, Yudian. *Rekonstruksi Epistemologi Keislaman*. Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Zuckerman, Ethan. "The Internet's Original Sin." *The Atlantic*, 14 Agustus 2014.